



<b>Judul</b>	: Ada Ditjen Khusus Pesantren, evaluasi bangunan Ponpes lebih efektif
<b>Tanggal</b>	: Sabtu, 18 Oktober 2025
<b>Surat Kabar</b>	: Rakyat Merdeka
<b>Halaman</b>	: 3

Ada Ditjen Khusus Pesantren

## Evaluasi Bangunan Ponpes Lebih Efektif

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mendukung peningkatan status Direktorat Pesantren Kemenag yang saat ini berada di bawah Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menjadi ditjen tersendiri. Keberadaan Ditjen Pesantren diyakini akan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam.

Posisi yang setara, sambungnya, bisa membuat program bantuan pelatihan serta audit teknis bangunan lebih efektif. "Kalau ada Ditjen khusus, tiap pesantren bisa mendapat akses langsung ke tenaga ahli, inspeksi bangunan, hingga dana perbaikan yang transparan dan tepat sasaran," kata Singgih di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Singgih menjelaskan, saat ini ada sekitar 5 juta santri dan lebih dari 42 ribu pondok pesantren (ponpes) aktif di Indonesia. Jika ada Ditjen Pesantren, lembaga ini akan lebih berdaya dalam melindungi, membina, dan memajukan pesantren. Tragedi Ponpes Al Khaziny di Jatim jadi peringatan akan kerentanan tata kelola dan infrastruktur pesantren.

"Pesantren memiliki akar sejarah yang kuat dan menjadi ben-

teng pembentukan karakter bangsa. Negara harus hadir memberi dukungan nyata," kata Singgih.

Soal ketimpangan penyaluran dana untuk lembaga pesantren, terutama dari Dana Abadi Pesantren yang dikelola bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), selama ini lebih difokuskan pada beasiswa. Sedangkan bantuan untuk pembangunan fisik dan rehabilitasi masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan.

Dia mengungkapkan, imbal hasil Dana Abadi Pendidikan dan Pesantren pada 2023 mencapai Rp 9,3 triliun. Namun, hanya sekitar Rp 250 miliar yang disalurkan ke lembaga pendidikan Islam itu. Padahal untuk membuat manfaatnya lebih luas, idealnya perlu alokasi dana hingga sekitar Rp 900 miliar untuk 5 juta santri.

"Sehingga dananya tidak hanya untuk beasiswa, tetapi juga pembangunan dan pemeliharaan fasilitas," papar Legislator Fraksi Golkar itu.

Selain itu, Singgih menilai pengutuhan SDM pesantren juga sangat mendesak. Pesantren adalah wajah asli pendidikan Islam di Indonesia yang telah berperan besar dalam mencerdaskan bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebang-

FOTO: IG PRIBADI



**Singgih Januratmoko**

saan. Namun, perhatian Pemerintah masih belum seimbang.

Saat ini, lanjutnya, masih banyaknya pesantren yang dikelola secara swadaya dengan fasilitas terbatas, teknologi minim, dan guru yang belum tersertifikasi.

"Data Balitbang Kemenag mencatat lebih dari 60 persen guru di pesantren belum bergelar sarjana. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal akses pendidikan yang belum merata," jelasnya.

Desakan juga datang dari Fraksi PKB DPR. Melalui sang ketua, Jazilul Fawaid, PKB menilai, pembentukan Ditjen Pesantren sudah menjadi kebutuhan mendesak. Terlebih di

tengah semakin besarnya peran pesantren dalam pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengutuhan karakter kebangsaan.

"Pesantren adalah institusi pendidikan khas Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa," ujar Jazilul di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Politikus yang karib disapa Gus Jazil itu mengatakan, dengan jumlah pesantren yang terus meningkat dan ragam tantangan yang dihadapi, sudah saatnya pesantren memiliki unit kerja mandiri di tingkat eselon I. Sehingga tata kelola, pembiayaan, dan pembangunan sarana prasarana pesantren bisa berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Gus Jazil menambahkan, keberadaan Ditjen Pesantren juga diharapkan menjadi wujud pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi pesantren dalam mencetak generasi bangsa yang berakhlak, moderat, dan cinta Tanah Air. Dengan berbagai kontribusi tersebut, pesantren tidak banyak menuntut.

"Kini saatnya negara hadir secara penuh, dengan kelembagaan yang kuat dan kebijakan yang berpihak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mendukung peningkatan status Direktorat Pesantren menjadi Ditjen Pesantren. Dia mengklaim telah lama mengusulkan hal tersebut, mengingat jasa dan peran besar pesantren sebagai lembaga pendidikan formal khas Indonesia.

Dia mengatakan, Pemerintah perlu mengoptimalkan dana abadi pesantren agar dipergunakan untuk program renovasi dan rehabilitasi bangunan pesantren. Apalagi, Pemerintah juga berencana menggunakan APBN untuk merenovasi Ponpes Al Khaziny serta audit kelayakan bangunan di berbagai Ponpes lainnya.

Politikus PKS itu menekankan, tragedi yang terjadi pada santri Al Khaziny, selain perlu menjadi bahan evaluasi, bisa dijadikan momentum pengutuhan hadirnya Negara terhadap institusi pesantren. Salah satunya adalah melalui pembentukan Ditjen Pesantren.

"Pada prinsipnya dan sesuai konstitusi, Pemerintah harus memberikan dukungan, baik melalui regulasi, pendampingan, bantuan via APBN," pungkasnya. ■ PYB